



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 21 April 2011

Halaman: 13

## Pemkot Godok Perwal

### Atur PKL di Alun-Alun Utara dan Selatan

**JOGJA** - Kawasan khusus Alun-Alun Utara dan Selatan dalam beberapa waktu ke depan, bakal terlihat lebih rapi. Pemkot Jogja saat ini tengah menggodok rancangan peraturan wali kota (Raperwal) yang mengatur penataan PKL di lahan milik keraton tersebut.

"Perwal itu nanti memang untuk mengatur PKL yang berjualan di dua kawasan khusus tersebut. Perwal ini merupakan petunjuk dari Perda 26 Tahun 2002 tentang penataan PKL," ujar Kepala Bagian Hukum Setda Kota Jogja Basuki ditemui di ruang kerjanya, kemarin (20/4).

Dia menjelaskan, pemkot telah mendapat kepercayaan dari pihak Keraton untuk menata penampilan Alun-Alun Utara maupun Selatan lebih rapi dan baik secara estetika. "Kami telah berkoordinasi dengan keraton sebagai pihak pemilik lahan untuk meminta masukan. Dan saat ini kami terus melakukan komunikasi juga dengan para PKL," imbuhnya.

Berdasarkan masukan Keraton, menurut Basuki, lalu lintas wisata sebagai penunjang utama pariwisata di kawasan Keraton lebih diperhatikan. Masalah lalu lintas ini harus menjadi pertimbangan utama bagi pemkot dalam menata PKL di kedua daerah tujuan wisata tersebut.

"Keraton sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pemkot untuk mengelola. Kami dan juga pihak keraton telah menyepakati pengertian jika kawasan Alun-Alun Utara dan Selatan juga merupakan fasilitas umum. Mereka juga tak keberatan penataan yang akan diatur dengan perwal," tambahnya.

**Baca Pemkot... Hal 14**

## Koordinasi dengan Dinas Pariwisata

**PEMKOT...**  
Sambungan dari hal 13

Basuki menjelaskan, pihaknya terus melakukan perbaikan pada konsep penataan ini dalam draf Raperwal agar nantinya sesuai keinginan semua pihak. Hingga saat ini, salah satu yang akan diatur dalam raperwal ialah mengenai pemberlakuan pergantian shift bagi para PKL.

"Kami sedang mematangkan konsepnya. Karena itu saat ini kami juga mencari masukan dari PKL sendiri maupun sejumlah stakeholder di kedua kawasan tersebut," terangya.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian Pedaga-

ngan Koperasi dan Pertanian (Dinsperindagkoptan) Kota Jogja Sugeng Darmanto mengatakan, pihaknya belum mengetahui secara pasti konsep penataan yang akan dilakukan. Menurutnya, berdasarkan perda maupun perwal yang sudah ada, keberadaan PKL hanya diperbolehkan berada di ruang publik.

"Itu sedang dikoordinasikan dengan Dinas Pariwisata. Karena PKL di sana menunjang pariwisata di kawasan Keraton maupun Kota Jogja pada umumnya. Maka, untuk bisa mendapatkan rumusan yang bisa diterima semua pihak, kami harus mempertimbangkan berbagai aspek yang ada," ungapnya. (eri)

| Nilai Berita                     | Sifat                                      | Tindak Lanjut                                       |
|----------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> Negatif | <input type="checkbox"/> Amat Segera       | <input type="checkbox"/> Untuk ditanggapi           |
| <input type="checkbox"/> Positif | <input checked="" type="checkbox"/> Segera | <input checked="" type="checkbox"/> Untuk diketahui |

| Instansi  | Nilai Berita | Sifat  | Tindak Lanjut   |
|---|--------------|--------|-----------------|
| 1. Bagian Hukum                                       | Netral       | Segera | Untuk Diketahui |
| 2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                    |              |        |                 |
| 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per |              |        |                 |

Yogyakarta, 26 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005